

Press Release INDEF

Tanggapan INDEF atas RAPBN 2012

Kamis, 18 Agustus 2011

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mempunyai tugas wajib yaitu harus mampu menjadi stimulus perekonomian. Esensi dari stimulus fiskal bahwa APBN harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, utamanya merangsang dan mendorong tingkat investasi dan produksi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan berujung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Catatan pertama dan utama setelah mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan membaca lengkap dokumen Lampiran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, adalah **bahwa RAPBN tersebut merupakan rancangan anggaran yang inskonstitusional**. Mengapa demikian? Karena RAPBN tersebut tidak menjalankan peran dan fungsi utama yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. RAPBN 2012 tidak menyentuh dan menjawab masalah yang paling krusial saat ini yaitu masalah pengangguran, deindustrialisasi, serta ancaman krisis pangan dan krisis energi. Padahal justru masalah tersebut merupakan akar permasalahan yang membelit perekonomian Indonesia pada tahun 2011 dan 2012 ke depan.

RAPBN 2012 disusun tanpa strategi yang jelas dalam mengatasi persoalan-persoalan yang mendasar tadi. Selain itu, berbagai asumsi, kebijakan dan program dalam RAPBN tersebut bertolak belakang dengan kenyataan, perkembangan dan kecenderungan yang ada. Oleh karena itu, usulan ini harus dirombak total oleh DPR, yang akan membahasnya selama bulan Agustus-Oktober.

Beberapa faktor yang mendorong kepada arah kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Postur Anggaran Tidak Ideal

- Tidak ada perubahan yang fundamental dalam postur RAPBN 2012 dibandingkan dengan APBN 2011 dan APBN-P 2011. Alokasi belanja rutin justru meningkat menjadi 80,43%, padahal APBN-P 2011 masih 78,49%. Artinya RAPBN 2012 justru mengalami kemunduran.
- Anggaran bertambah besar, namun ruang gerak fiskal sebagai stimulus perekonomian tetap rendah. Anggaran untuk belanja modal hanya 17,62% dan belanja sosial hanya 6,67%. Stimulus fiskal tidak tercermin dalam alokasi anggaran.

- Program *pro growth, pro job, dan pro poor* hanya slogan, tidak diikuti alokasi anggaran, tidak ada strategi dan program yang jelas.
- RAPBN 2012 terlalu dipaksakan untuk memenuhi MP3I dengan 11 prioritas pembangunan, sehingga terancam mengalami disorientasi dan disfungsi, karena perubahan faktor eksternal dan sikap ambivalen perumus kebijakan.

2. Inkonsistensi Kebijakan Anggaran

- Proporsi anggaran gaji pegawai meningkat dari 20,14% (APBN-P 2011) menjadi 22,61% (RAPBN 2012) atau mencapai 215,7 T. Meningkatnya alokasi belanja untuk gaji pegawai menunjukkan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, di mana bertentangan dengan kebijakan menteri keuangan untuk moratorium gaji PNS.
- Gaji pegawai selalu naik, di sisi lain reformasi birokrasi gagal, pelayanan publik tetap rendah dan kasus korupsi meningkat.

3. Alokasi Anggaran tidak tepat sasaran

- Anggaran untuk subsidi BBM masih sangat besar, walau terjadi penurunan dari 195,3 T (2011) menjadi 168,6 T (2012). Hal ini menunjukkan tidak ada kebijakan energi yang jelas dan komprehensif guna mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM.
- Dana transfer daerah meningkat signifikan tapi proporsi terbesarnya adalah untuk DAU, di mana rata-rata 70% untuk gaji pegawai. Dana transfer daerah tidak berdampak pada penguatan perekonomian daerah.

4. Sumber Pembiayaan Defisit yang membingungkan dan tidak transparan

Defisit anggaran sebesar 125 T (1,5%), namun total pembiayaan dari utang sebesar 135,2 triliun. Lebih membingungkan lagi jika dilihat rincian sumber pembiayaan, di mana (i) penarikan utang luar negeri = 56 triliun, (ii) SBN = 134,5 triliun, dan (iii) pinjaman dalam negeri 1 triliun. Artinya, pembiayaan luar negeri yang dikatakan minus sebenarnya hanya karena penarikan baru lebih kecil dari penerusan pinjaman + pembayaran cicilan pokok. Realisasinya terdapat tambahan utang luar negeri sebesar 56 triliun.

5. Era Kecanduan Utang

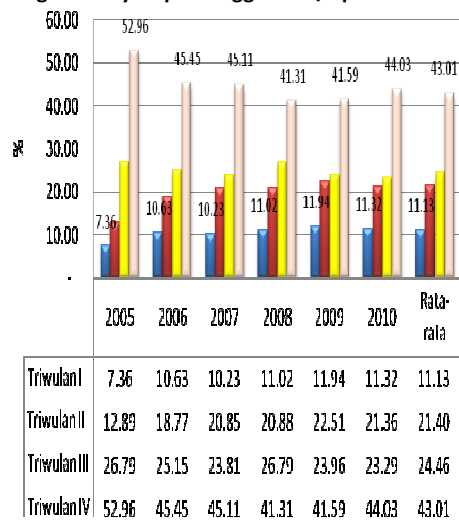
- Ketergantungan terhadap utang sudah seperti candu, pada RAPBN 2012 penarikan utang luar negeri mencapai 56 T. Padahal total *outstanding* utang luar negeri pada akhir tahun 2010 sudah mencapai US\$ 86,1 miliar (jika kurs Rp8.800/US \$ =757,68 triliun), dan setiap tahunnya terpaksa menyedot anggaran 47,3 triliun untuk bayar bunga dan cicilan utang.
- Penerbitan SBN mencapai 134 triliun, dengan total *outstanding* mencapai 902,4 triliun.
- Presiden memerintahkan kabinetnya untuk menerapkan anggaran berimbang pada tahun 2014, instruksi tersebut adalah normatif dan tidak realitis. Jika target

itu tidak hanya sekedar slogan maka alokasi dari defisit anggaran tahun ini mustinya fokus untuk belanja yang produktif yang dapat memacu penerimaan negara.

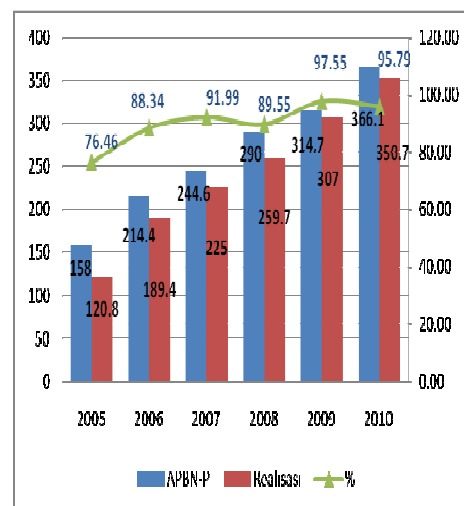
6. Mengugat Efektifitas Kebijakan Defisit Anggaran

Defisit anggaran yang dibiayai mahal dari utang, baik pembayaran bunga utang dalam negeri maupun luar negeri, namun penggunaannya “sembarangan”. Ironis sekali kebijakan anggaran defisit namun hampir setiap tahun penyerapan anggaran hanya sekitar 95%. Itu pun dengan pola tingkat penyerapan yang menumpuk pada triwulan IV (43%), bahkan pada dua bulan terakhir yaitu bulan November dan Desember.

Tingkat Penyerapan Anggaran K/L per triwulan (%)



Pagu dan Realisasi Anggaran K/L (Rp Triliun)



7. Tiadanya strategi pengelolaan anggaran: anggaran gagal mensejahterakan rakyat

- Perencanaan anggaran disusun secara konservatif, tidak ada upaya yang reformatif yang sungguh-sungguh mampu mensejahterakan rakyat.
- Alokasi anggaran tidak memunculkan program-program dan strategi untuk mencapai *pro job, pro poor, dan pro growth*.
- Totalnya alokasi subsidi Rp 208,9 triliun (turun Rp 28,3 triliun dari APBN-P 2011). Celaknya, sekitar 60% dihabiskan untuk subsidi BBM (Rp 123,6 triliun), sisanya dipakai subsidi listrik (Rp 45 triliun), dan subsidi non-energi hanya (Rp 40,3 triliun). Betapa semangat pemihakan tidak tampak dalam struktur subsidi.
- Tercatat, ada tujuh kementerian yang memperoleh alokasi dana di atas Rp 20 triliun, namun sektor pertanian dan industri tidak masuk di dalamnya. Sektor pertanian hanya memperoleh anggaran Rp 17,8 triliun. Padahal, sektor pertanian menampung sekitar 42% dari total tenaga kerja (formal).

Rekomendasi :

1. DPR harus melakukan perubahan yang fundamental terhadap postur RAPBN 2012, utamanya adalah untuk meningkatkan ruang fiskal dan harus ada efisiensi agar anggaran betul-betul berbasis pada *pro job, pro poor, dan pro growth*. Tugas utama pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Harus ada konsistensi kebijakan. Kebijakan Moratorium PNS harus tercermin dalam APBN 2012, terutama upaya realokasi PNS ke sektor-sektor produktif. Moratorium juga disertai agenda reformasi birokrasi, terutama dalam peningkatan layanan publik dan penyederhanaan layanan perijinan agar menciptakan iklim investasi yang kondusif.
3. Harus ada alternatif kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap, terencana dan pasti. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi konsumsi BBM dengan mengalihkan energi alternatif yang murah seperti gas. Subsidi BBM harus direalokasi untuk upaya kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM.
4. Harus ada realokasi subsidi agar tepat sasaran. Subsidi harus diupayakan mendorong kegiatan produktif daripada konsumtif.
5. Alokasi Defisit APBN, 2/3 harus digunakan untuk tambahan pembiayaan infrastruktur ekonomi, utamanya infrastruktur jangka panjang yang *multi years*. Perlu dibentuk lembaga pendanaan infrastruktur jangka panjang.
6. Belanja infrastruktur harus diprioritaskan untuk *debottlenecking, domestic connectivity* (utamanya konektivitas desa-kota), ketahanan pangan, ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat.
7. Adanya *leadership/kepemimpinan* untuk mengintegrasikan, mensinergikan dan mengkoordinasikan pencapaian program-program prioritas.